

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- 3.1            **Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**
- 3.1.1        **Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkenaan dengan Pelayanan Dasar**
- 3.1.1.5      **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ini ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengampu sasaran sebagai berikut:

- **Indeks Toleransi/ Inklusi Sosial dengan target pada Tahun 2021 adalah 0,74 dan capaian 0,78.**

Strategi tercapainya Indeks Toleransi / Inklusi Sosial pada tahun 2021 adalah dengan melakukan survey terhadap sampel populasi yang mana dijadikan sampel adalah anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan 2 (dua) variabel dan 4 (empat) indikator sebagai berikut :

- 1.    Variabel Penerimaan Perbedaan Terhadap Budaya Sosial dengan indikator menerima kegiatan agama lain dan menerima tempat ibadah agama lain.  
Adapun perhitungangan populasi yang dijadikan sampel adalah anggota FKUB berjumlah 17 orang dengan rincian sebagai berikut :
  - Indikator menerima kegiatan agama lain dan;
  - Indikator menerima tempat ibadah lainNilai Interval = Nilai Bobot

Nilai Bobot	Keterangan
1	Tidak Setuju
2	Kurang Setuju
3	Setuju
4	Sangat Setuju

Rumus Indeks Toleransi /Inklusi Sosial :

Dimensi Indeks =  $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per item x nilai penimbang (Bobot)}}{\text{Total item yang terisi}}$

Sample Kuisisioner		Rata-Rata Sample	Nilai Bobot	Keterangan	Perhitungan
Indikator I	Indikator II				
1	2	4	5	6	7 =4*5
5 Org	5 Org	5 Org	4	Sangat Setuju	20
8 Org	8 Org	8 Org	3	Setuju	24
4 Org	4 Org	4 Org	2	Kurang Setuju	8
0 Org	0 Org	0 Org	1	Tidak Setuju	0
17 Org	17 Org	17 Org			52

*Dimensi Indeks* =  $\frac{52}{17} = 3,06$

*Indeks Toleransi* =  $\frac{3,06}{4} = 0,77$

Ket. Angka 4 adalah Jumlah Indikator

2. Variabel Inklusi terhadap Minoritas dengan indikator menerima kegiatan suku lain dan menerima pemimpin bersuku lain.
- Indikator menerima kegiatan suku lain dan ;
  - Indikator menerima pemimpin bersuku lain
- Nilai Interval = Nilai Bobot

Nilai Bobot	Keterangan
1	Tidak Setuju
2	Kurang Setuju
3	Setuju
4	Sangat Setuju

Rumus Indeks Toleransi /Inklusi Sosial :

*Dimensi Indeks* =  $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per item x nilai penimbang (Bobot)}}{\text{Total item yang terisi}}$

Sample Kuisisioner		Rata-Rata Sample	Nilai Bobot	Keterangan	Perhitungan
Indikator I	Indikator II				
1	2	4	5	6	7 = 4*5
11 Org	7 Org	9 Org	4	Sangat Setuju	36
12 Org	10 Org	11 Org	3	Setuju	33
2 Org	8 Org	5 Org	2	Kurang Setuju	10
0 Org	0 Org	0 Org	1	Tidak Setuju	0
25 Org	25 Org	25 Org			79

$DimensiIndeks = \frac{79}{25} = 3,16$

$Indeks Toleransi = \frac{3,16}{4} = 0,79$

Ket. Angka 4 adalah Jumlah Indikator

- Nilai Total Indeks Toleransi / Inklusi Sosial sebagai berikut

$Indeks Toleransi = \frac{0,77+0,79}{2} = 0,77$

Ket. Angka 2 adalah Jumlah Variabel

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Toleransi menunjukkan bahwa secara garis besar tingkat *Penerimaan atas Perbedaan Sosial Budaya dan Dukungan Sosial* kepada Minoritas pada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sudah baik. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya ketidaksetujuan terhadap aktivitas dan perbedaan perlakuan terhadap suku/agama lain. Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki toleransi apabila suku dan agama lain melakukan kegiatan dan dibangun tempat ibadah agama lain di lingkungan sekitar.

- I. Analisis keberhasilan pada indeks toleransi ialah sebagai berikut:
  1. DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggran 2021.
  2. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.
  3. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.
- II. Hambatan / kendala dalam Pencapaian Target Indikator Daerah (RPJMD) Tahun 2021 :
 

Kendala / hambatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Daerah (RPJMD) tentang Indeks toleransi/Induksi Sosial yaitu untuk Pencapaian target ini membutuhkan Anggaran yang cukup besar karena harus melibatkan banyak Surveyor yang akan melakukan survey kepada lapisan Masyarakat dari pintu ke



pintu, selain itu karena masih dalam masa Pandemi Covid-19 yang menjadi kendala untuk melakukan survey secara langsung (door to door).

III. Adapun Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang mendukung untuk pencapaian indikator Induksi toleransi / Induksi sosial sebagai berikut :

› Program

Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

› Kegiatan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

› Sub Kegiatan

- Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

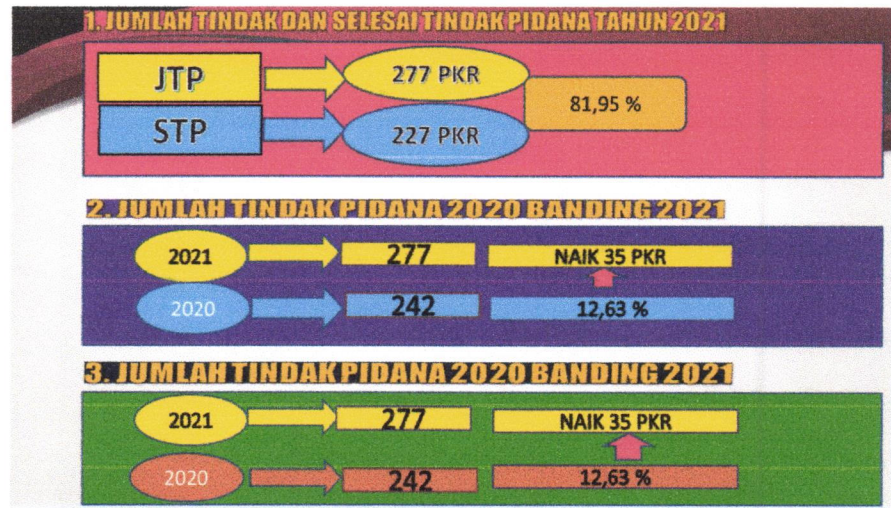
IV. Strategi pencapaian toleransi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai ujung tombak dalam menjaga keharmonisan dan toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai koordinator dan fasilitator.
2. Melaksanakan sosialisasi pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di 6 (Enam) Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Mengikuti pelaksanaan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda.
4. Rapat koordinasi secara virtual tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang bertujuan menambah ilmu pengetahuan tentang kebangsaan dan membangun NKRI serta meningkatkan rasa nasionalisme.

Strategi pencapaian Indeks Toleransi /Inklusi Sosial ditengah pandemi Covid-19 yang masih mewabah akan tetapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap memperkuat koodinasi dan konsolidasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai ujung tombak / garda terdepan dalam menjaga keharmonisan dan toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dengan Badan Kesbangpol sebagai koordinator dan fasilitator.



- **Persentase Penurunan Tindak Kriminal dengan target pada Tahun 2021** adalah 15% dan dan realisasi -12,63% (kasus naik) capaian -84,20% dengan selesai tindak pidana (STP) 81,95%



$$\text{Rumus Perhitungan} = \frac{n_0 - n_1}{n_1} \times 100$$

**Keterangan:**

$n_1$  = Tahun akhir (2021)

$n_0$  = tahun awal (2020)

Jumlah kasus kriminal tahun 2020 berjumlah 242 kasus

Jumlah kasus kriminal tahun 2021 berjumlah 277 kasus

$$\begin{aligned} \text{Rumus Perhitungan} &= \frac{242 - 277}{277} \times 100 \\ \text{Persentase} &= -12,63 \% \end{aligned}$$

I. Analisis indikator persentase penurunan tindak kriminal dimana angka kriminalitas tahun 2020 sebanyak 242 kasus dan tahun 2021 sebanyak 277 kasus, terdapat selisih 35 kasus atau naik sebesar 12.63% (sumber Polres Kobar), akan tetapi jumlah kasus tindak pidana yang terselesaikan selama tahun 2021 sebanyak 227 kasus atau 81,95%. Dapat dikatakan selama tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah kasus tindak kriminal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, hal ini berbanding terbalik dengan indikator kinerja daerah terkait persentase penurunan tindak kriminal. Permasalahan kasus tindak kriminal sangat pelik untuk dapat ditargetkan tingkat penurunan tindak kriminal setiap tahunnya, karena sifatnya kondisional dan situasional.

II. Hambatan / kendala dalam Pencapaian Target Indikator Daerah (RPJMD) Tahun 2021 :

Kendala / hambatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Daerah (RPJMD)

dalam persentase Penurunan Tindak Kriminal yaitu Permasalahan Kasus Tindak Kriminal sangat pelik untuk dapat ditargetkan tingkat Penurunan Tindak Kriminal setiap Tahunnya, karena sifatnya Kondisional dan Situasional.

- III. Adapun Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang mendukung untuk pencapaian indikator persentase Penurunan Tindak Kriminal sebagai berikut :
- > Program  
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
  - > Kegiatan  
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
  - > Sub Kegiatan
    - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penaganan Konflik Sosial.
    - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penaganan Konflik Sosial.
    - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penaganan Konflik Sosial.

Berikut kami lampirkan tabel data tindak pidana tahun 2020 banding 2021 dan tabel data tindak pidana khusu tahun 2021:

**Data Tindak Pidana Tahun 2020 Banding 2021**

NO	URAIAN	2020	2021	CENDERUNG	PROSENTASE
1	JUMLAH TP	242	277	N=35	12,63%
2	SELESAI TP	221	227	N=6	2,64%
3	%SELESAI TP	91,32%	81,95%	T=9,37	10,26%
4	RESIKO TP	77 Jiwa	88 Jiwa	N=11	14,28%
5	SELANG WAKTU	36'.19".08"	31'.09".07"	-	-

Data Tindak Pidana Khusus Tahun 2021

NO	URAIAN	JTP	STP	PROSENTASE
1	ILL LOGGING	3	3	100 %
2	ILLEGAL MINING	6	6	100 %
3	PEMBAKARAN LAHAN	5	5	100 %
4	KORUPSI	2	1	1 PKR SP3 ( TSK MD )
5	UU PERLINDUNGAN KONSUMEN	1	1	100 %
6	UU ITE	3	3	100 %
JUMLAH		20	19	90 %



**JTP - STP TAHUN 2021 POLRES KOBAR**

NO	JENIS TP	BULAN																								JUMLAH	
		JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGUST		SEPT		OKT		NOP		DES			
		JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP
1	Laporan Palsu											1	0			0	1									1	1
2	Palsu Surat/Dokumen	1	0					1	1			0	1												2	2	4
3	Cabul	3	0	3	0	0	3	0	3							0	2									6	8
4	Perlind Anak	2	0			0	2	1	1	1	1	4	0	2	3	0	2	3	1	2		4	2	3	2	22	14
5	Penelantaran Keluarga																				1	0			1	0	
6	Perkosaan																								0	0	
7	Perc. Perkosaan									1	0			0	1											1	1
8	Perjudian																								0	0	
9	Penculikan																								0	0	
10	Pembunuhan																	1	0					0	1	1	1
11	Perc. Penculikan																									0	0
12	Aniaya/Anring	0	1	2	0	2	2	2	2	0	1	3	1	1	0	5	3	0	1	1	2	0	1			16	14
13	Anirat									1	0															1	0
14	KDRT	0	1	3	2	1	2	1	1	1	1	8	3			1	3	0	1		1	1	0			16	15
15	Pengeroyokan											1	0			0	1			1		0	1			2	2



NO	JENIS TP	BULAN																								JUMLAH	
		JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGUST		SEPT		OKT		NOP		DES			
		JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP
16	Cubis	4	3	2	0	2	3	2	1	4	0	0	2	1	2	5	0	3	1	5	6	3	3	1	0	32	21
17	Curat	2	2	5	7	0	4	3	3	6	3	1	3	3	4	5	2	2	2	2	4	10	3	1	6	40	43
18	Curas																									0	0
19	Curanmor	1	0	4	0	0	1	1	4			2	0			0	2			3						11	7
20	Perc. Curi																									0	0
21	Perc. Curas																									0	0
22	Gelap	0	1	1	0	1	2	2	1	1	2	2	1	3	1	2	3	4	2	2	3	3	2	0	2	21	20
23	Gelap R2/R4	7	0	0	6							1	0	1		2	1	1	0	1	1	2	2	1	0	16	10
24	Penipuan	0	3			0	1							1	0	1	0	1	1			3	1	6	0	12	6
25	Peras / ancam											5	0			1	5				1					6	6
26	Perampasan																									0	0
27	Pengrusakan																					1	0	1	1	2	1
28	Penadahan	3	5	4	1	0	6	0	1			3	0	0	3	4	1	2	0	2	4	0	2	1	1	19	24
29	Pencucian Uang											0	1													0	1



NO	JENIS TP	JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGUST		SEPT		OKT		NOP		DES		JUMLAH	
		JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP
30	Illegal Logging																			3				0	3	3	3
31	Illegal Fishing																									0	0
32	Illegal Minning	4	1	1	3	0	1	0	1	0	0											1	0			6	6
33	Pembakaran Lahan					1	0	1	0	1	1	2	1			0	2	0	1							5	5
34	UU Fidusia															2	0				1					2	1
35	Pembakaran																									0	0
36	Kebakaran	1	0	1	0	1	0			3	0					1	0	2	0	1		1	0	1	0	12	0
37	Sajam			2	0	0	2			1	0	0	1	1	1	0	1									4	5
38	Senpi																									0	0
39	BBM/Migas/LPG																									0	0
40	Korupsi							1	0	1	0															2	0
41	Perzinahan					1	0					0	1													1	1
42	Pornografi															1	0							0	1	1	1
43	Perdagangan Orang																									0	0
44	Perlind Konsumen							0	1			0	1													1	1
45	UU ITE											1	0	2	0	0	1	0	2							3	3
46	UU Pangan																									0	0
	<u>Lain - Lain :</u>																									0	0



NO	JENIS TP	JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGUST		SEPT		OKT		NOP		DES		JUMLAH	
		JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP	JTP	STP
47	Haki / Hak Cipta																									0	0
48	Cemar nama baik	1	0																							1	0
49	Buat tdk Senang													1	0											1	0
50	Serobot Tanah																									0	0
51	Kej. Bid Kehutanan																									0	0
52	UU Lingk Hidup																									0	0
53	Pelanggaran Proses					1	0			0	1															1	1
	<u>Guan KTM Lain</u>																									0	0
54	Laka Air / Lalai MD																		1							1	0
55	Laka Kerja											1	0	1	0						0	1				2	1
56	Temu Mayat																		1		1	0				2	0
57	Gantung Diri											1	0													1	0
58	TPPO																									0	0
	Lalai sebabkan luka																									0	0
	<b>Jumlah</b>	29	17	28	19	10	29	15	19	22	10	36	16	17	15	30	30	19	12	25	23	31	18	15	19	277	227

Meskipun jumlah kasus tindak kriminal tahun 2021 mengalami kenaikan akan tetapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai mitra kerja Aparat Keamanan Daerah (Instansi Vertikal) tetap menjalankan strategi dan rencana aksi untuk memelihara kondusifitas daerah.

Strategi/Rencana Aksi dalam pencegahan tindak kriminal di Wilayah kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

- Sinergitas / kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang beranggotakan Instansi Vertikal (Polse Kobar, Kodim 1014/Pbn, Lanud Iskandar P.Bun, Sub Denpom P. Bun, BIN, BAIS, Kejaksaan Kobar, Unit Kerja Kantor Imigrasi kelas II TPI Sampit dan SKPD terkait serta Camat se-Kobar yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan Patroli Cipta Kondisi di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, serta melakukan rapat-rapat untuk membahas perkembangan daerah terkini untuk memberikan masukan kepada Pimpinan Daerah.

- Melibatkan peran serta masyarakat dalam ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemerintah Daerah membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang beranggotakan masyarakat biasa yang terdiri dari tokoh agama/masyarakat, Ormas/LSM/, wartawan dalam rangka menjangkau, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi dari masyarakat mengenai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitarnya untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak keamanan agar setiap permasalahan dapat dideteksi dini sehingga tidak menjadi konflik yang lebih besar lagi.

- Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencegahan Konflik Sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang merupakan rencana kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh Instansi terkait (SOPD di Kab. Kobar dan Instansi Vertikal) dengan memetakan potensi konflik dalam rangka mencegah terjadinya konflik sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu sebagai tindakan pencegahan dini juga melaksanakan monitoring potensi konflik di 6 (Enam) Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selain sasaran di RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga mempunyai sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA.



Pada indikator Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA memiliki target 0 (nol) kasus dan terealisasi 0 (nol) kasus atau capaian kinerja 100%. Hal ini merupakan perwujudan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memelihara dan menjaga kerukunan dan toleransi antar suku, agama, ras dan golongan ditengah pandemi dengan melaksanakan rencana aksi yaitu :

- Rapat koordinasi dan konsolidasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai sebagai ujung tombak dalam menjaga keharmonisan dan toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dengan Badan Kesbangpol sebagai koordinator dan fasilitator.
- Melaksanakan sosialisasi pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di 6 Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Rapat koordinasi secara virtual tentang Revolusi Mental sebagai gerakan memperbaiki dan membangun karakter bangsa dan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong.
- Mengikuti pelaksanaan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda.
- Rapat koordinasi secara virtual tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang bertujuan menambah ilmu pengetahuan tentang kebangsaan dan membangun NKRI serta meningkatkan rasa nasionalisme.

Beberapa rencana aksi dan strategi diatas merupakan tolok ukur dalam pencapaian/realisasi indikator Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang mendukung untuk pencapaian indikator Penyelesaian Potensi Konflik Bernuansa Saraagar tidak menjadi Konflik Sara sebagai berikut :

- > Program  
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- > Kegiatan  
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- > Sub Kegiatan
  - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
  - Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.



2. Persentase Penanganan Konflik Sosial dengan target pada tahun 2021 adalah 0% (tidak ada konflik sosial) dan capaian 100%.

Pada indikator Prosentase penanganan konflik sosial target 0 (nol)% dan realisasi 0 (nol)%. Artinya, selama tahun 2021 tidak adanya penanganan konflik sosial yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan jika dipersentasekan capaian kinerja yaitu 100%. Capaian ini merupakan salah satu tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memelihara kondusifitas daerah ditengah pandemi Covid-19 dengan rencana aksi yaitu:

- Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Pemantauan Orang Asing berdasarkan SK Bupati.
- Melaksanakan rapat koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- Melakukan pemantauan dan monitoring keamanan/patroli cipta kondisi dan bermitra bersama instansi vertikal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Berkoordinasi dan konsolidasi dengan aparat keamanan daerah (instansi vertikal).
- Menyusun dan melaporkan Rencana Aksi Daerah (RAD) hasil dari pencegahan dan penanganan konflik sosial.
- Monitoring potensi konflik di 6 Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Beberapa rencana aksi dan strategi diatas merupakan tolok ukur dalam pencapaian/realisasi indikator Prosentase penanganan konflik sosial.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang mendukung untuk pencapaian indikator Persentase Penanganan Konflik Sosial dengan target pada tahun 2021 sebagai berikut :

› Program

Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

› Kegiatan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

› Sub Kegiatan

- Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial.
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga

Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial.

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial.

### 3. Indikator Prosentase Fasilitasi Pendidikan Politik

Pada indikator Prosentase fasilitasi pendidikan politik, target tahun 2021 adalah 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. Hal ini merupakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai fasilitator dalam menambah pengetahuan dan wawasan tentang pendidikan politik masyarakat ditengah pandemi Covid-19 dengan rencana aksi yaitu :

- Sosialisasi/Penyuluhan Pendidikan Politik Masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Melaksanakan pelatihan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Partai Politik.

Beberapa rencana aksi dan strategi diatas merupakan tolok ukur dalam pencapaian/realisasi indikator Prosentase fasilitasi pendidikan politik.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang mendukung untuk pencapaian indikator Prosentase Fasilitasi Pendidikan Politik sebagai berikut:

- > Program  
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
- > Kegiatan  
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- > Sub. Kegiatan
  - Penyusunan Program Kerja di Bidang Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
  - Pelaksanaan Kebijakan Bidang Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik,

Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

- Pelaksanaan Koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

#### 4. Indikator Persentase Organisasi Dan Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif

Pada indikator Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif target selama Tahun 2021 adalah 90% dengan realisasi 100% atau capaian kinerja 111.11%. Hal ini merupakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditengah pandemi dan rasionalisasi anggaran/*refocusing* untuk penanganan covid-19 tetap melaksanakan koordinasi dan fasilitasi keberadaan organisasi dan lembaga kemasyarakatan baik yang masa aktif Surat Keterangan Terdaftar (SKS) masih berlaku dan atau yang aktif melaporkan keberadaan dan kegiatan selama tahun 2021, dengan rencana aksi yaitu :

- Melaksanakan pemantauan / monitoring untuk melakukan pendataan terhadap keberadaan sekretariat Ormas/LSM yang di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Memfasilitasi dan melayani koordinasi / konsultasi tentang Pendaftaran Surat Keterangan Keberadaan Ormas.
- Rapat koordinasi bersama pengurus Ormas/LSM Se Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Memfasilitasi aspirasi dari Organisasi Kemasyarakatan bersama Bupati dan jajaran Forkopimda dalam rangka mempererat silaturahmi dan mendukung program-program Pembangunan Pemerintah Daerah.
- Rapat Penyusunan RAD P4GN 2022.

Beberapa rencana aksi dan strategi di atas merupakan tolok ukur dalam pencapaian/realisasi indikator Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif.



Adapun Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang mendukung untuk pencapaian indikator Persentase Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif target selama Tahun 2021 sebagai berikut :

› Program

Pemberdayaan dan Pengawas Organisasi Kemasyarakatan.

› Kegiatan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

› Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawas Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawas Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawas Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Adapun beberapa hambatan/kendala dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra sebagai berikut :

1. Adanya Pandemi Covid – 19 yang masih mewabah menyebabkan beberapa agenda kegiatan dibatasi dalam pelaksanaanya.
2. Data – data Informasi dari mitra kerja masih bersifat universal.
3. Beberapa ORMAS masih kurang aktif dalam melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. SDM yang masih belum memahami terkait Indikator Kinerja Sasaran

Sedangkan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diharapkan mampu mencapai target tersebut adalah :

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi/ Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut DPRD
8.	Unsur Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		<p><b>1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>            Persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina</p> <p><b>a. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>            Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi Pembauran Kebangsaan dan Kerukunan Umat Beragama dan pemuda-pemudi/pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) serta kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa Perjuangan 14 Januari 1946 Kumai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Peserta Penyuluhan Pembauran Kebangsaan dan Kerukunan Umat Beragama</li> </ul> </li> <li>• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang</li> </ul>	29,05%	29,05%	-	-	-
				<p>Jumlah Peserta Penyuluhan/Sosialisasi Pembauran Kebangsaan dan Kerukunan Umat Beragama dan pemuda-pemudi/pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) serta kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa Perjuangan 14 Januari 1946 Kumai</p>	430 Orang	430 Orang	-	-	-
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang</li> </ul>	60 Orang	60 Orang	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi/ Perangkat Daerah/ Pelaksana	Kebijakan	Uraian Prog/ Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut DPRD
				<p>Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Seiarah Kebangsaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pemuda-pemudi dan pelajar yang mengikuti kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) dan Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Haul dan Tabur Bunga Peristiwa perjuangan 14 Januari 1946 Kumai</li> </ul>	370 Orang	370 Orang	-	-	-
				<p><b>2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan serta Budaya Politik</b>  Presentase Pemahaman Politik Masyarakat</p> <p><b>a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>  Jumlah peserta sosialisai/penyuluhan politik masyarakat dan peserta pelatihan penyusunan LPJ bantuan keuangan partai politik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Program Kerja di Bidang</li> </ul>	20,52%	20,52%	-		
				<p>Jumlah peserta sosialisai/penyuluhan politik masyarakat dan peserta pelatihan penyusunan LPJ bantuan keuangan partai politik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Program Kerja di Bidang</li> </ul>	70 Orang	70 Orang	-		















3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1.	Nihil	Nihil	Nihil

Catatan : Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TahunAnggaran 2019(kalau ada)

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1.	Nihil	Nihil	Nihil

Catatan : Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya

#### **4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan (kalau ada)**

Uraian mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan.

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya.

#### **4.2 Hambatan/ Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian**

Memuat uraian hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya maupun tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintah di bawahnya.